

Pengantar oleh Muhadam Labolo

BOOK SERIES
DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH

DINASTI
POLITIK
— D A N —
DEMOKRASI
LOKAL



VOLUME I

Editor
Moh. Nizar & Wais Alqarni

SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pengantar oleh Muhadam Labolo

BOOK SERIES
DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH

DINASTI POLITIK — DAN — DEMOKRASI LOKAL



VOLUME I

Editor
Moh. Nizar & Wais Alqarni

SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS

Judul Buku:

BOOK SERIES: DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH
DINASTI POLITIK DAN DEMOKRASI LOKAL

Editor:

Moh. Nizar
Wais Alqarni

Desain Sampul dan Tata Letak:

Sayed Jamaluddin

ISBN: 978-623-264-293-5

ISBN: 978-623-264-294-2 (PDF)

Pracetak dan Produksi:

SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS

Penerbit:

Syiah Kuala University Press
Jl. Tgk Chik Pante Kulu No.1 Kopelma Darussalam 23111,
Kec. Syiah Kuala. Banda Aceh, Aceh
Telp : 0651 - 8012221
Email : upt.percetakan@unsyiah.ac.id
unsyiahpress@unsyiah.ac.id
Website : <http://www.unsyiahpress.unsyiah.ac.id>

Volume: I

Cetakan Pertama, 2021

xiv + 227 Hal (15,5 X 23)

Anggota IKAPI 018/DIA/2014

Anggota APPTI 005.101.1.09.2019

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
PRAKATA	ix
KATA PENGANTAR	xi
BAB 1	1
POPULISME HASAN TIRO: DARI NASIONALISME KE ETNONASIONALISME.....	1
PENDAHULUAN.....	2
NASIONALISME SETENGAH HATI.....	3
POPULISME ALA TIRO: ETNONASIONALISME UNTUK BANGSA ACEH	7
POPULISME TIRO DAN REFLEKSI POST-HELSINKI.....	11
DAFTAR PUSTAKA	13
BAB 2	15
BUMD, ANTARA PROFESIONAL DAN POLITISASI	15
SEJARAH BUMD.....	16
PERAN BUMD DALAM PEMBANGUNAN DAERAH	17
KONEKSI POLITIK	19
BUMD DAN KONEKSI POLITIK.....	20
DAMPAK NEGATIF ADANYA KONEKSI POLITIK	20
DAMPAK POSITIF ADANYA KONEKSI POLITIK.....	21
FAKTOR-FAKTOR LAIN DALAM KONEKSI POLITIK	23
EVOLUSI HUBUNGAN POLITIK ANTARA BUMD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH.....	24
SOLUSI.....	25
DAFTAR PUSTAKA	27
BAB 3	31
KEBUN RAHASIA POLITIK: KANDIDASI CALON KEPALA DAERAH.....	31
KEBUN RAHASIA POLITIK : KANDIDASI PDI PERJUANGAN.....	32
FUNGSI REKRUTMEN PARTAI POLITIK.....	34
DETERMINAN KANDIDASI DALAM REKRUTMEN POLITIK	35
DETERMINAN KANDIDASI DALAM FAKTOR FORMAL DAN INFORMAL	35
KANDIDASI	36
MODEL PENYELEKSIAN KANDIDAT: FORMAL DAN INFORMAL	37
SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI DALAM PENYELEKSIAN KANDIDAT	37
MOTIF PEMILIHAN CALON KANDIDAT	38
PROSES KANDIDASI PDI PERJUANGAN DALAM PENCALONAN KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013	39
DETERMINAN PROSES KANDIDASI FORMAL DAN INFORMAL.....	41
MOTIF PARTAI DILIHAT DARI PROSES KANDIDASI PDIP PADA PILGUB JATENG 2013.....	41

KESIMPULAN	42
DAFTAR PUSTAKA	45
BAB 4	49
DINASTI POLITIK PADA ARAS LOKAL DI MALUKU UTARA	49
REPRODUKSI DINASTI POLITIK: ORANG KUAT LOKAL	50
PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2018: PERAN MODAL POLITIK	56
DUKUNGAN TOKOH/ELIT POLITIK: REPRODUKSI MODAL POLITIK	56
MODAL EKONOMI KANDIDAT: ILUSI KEMENANGAN	60
MODAL EKONOMI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	62
HARTA KEKAYAAN PASANGAN ABDUL GANI KASUBA DAN M. ALI YASIN	63
HARTA KEKAYAAN PASANGAN BURHAN ABDURAHMAN-ISHAK DJAMALUDIN	64
HARTA KEKAYAAN MUHAMMAD KASUBA-MADJID HUSEN	64
KOMPETISI PILKADA: PSU PENENTU KEMENANGAN	65
DAFTAR PUSTAKA	66
BAB 5	75
POLITIK KEKELUARGAAN PADA KONTESTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERIODE 2005-2020 DI KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH	75
SELAYANG PANDANG KABUPATEN KLATEN	76
PERJALANAN POLITIK KABUPATEN KLATEN (PEMILIHAN KEPALA DAERAH)	77
PERIODE TAHUN 2000-2005	77
PERIODE TAHUN 2005-2010	79
PERIODE TAHUN 2010-2015	80
PERIODE TAHUN 2015-2020	82
PERIODE TAHUN 2020-2025	83
ELIT POLITIK DAN POLITIK KEKELUARGAAN	83
JABATAN BUPATI-WAKIL BUPATI KLATEN 2000-2020	86
DAFTAR PUSTAKA	87
BAB 6	89
STRATEGI PENCEGAHAN POLITIK UANG	89
BERBASIS KEARIFAN LOKAL	89
DINAMIKA POLITIK DALAM PEMILU DI INDONESIA	90
PEMILU DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	93
MENCEGAH POLITIK UANG DALAM PEMILU; MUNGKINKAH?	95
PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL	99
DAFTAR PUSTAKA	102
BAB 7	105
KEMUNDURAN DEMOKRASI DI ARAS LOKAL: SEBUAH TELAHAH PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILU DI PROVINSI RIAU	105
DEMOKRASI, PARTISIPASI DAN LEGITIMASI	106
MAKNA PARTISIPASI POLITIK: PERSPEKTIF PARA SARJANA	108

LAIN LUBUK LAIN IKANNYA: POTRET PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT RIAU.....	112
DEMOKRATISASI POLITIK LOKAL: TIDAK ADA KATA TERLAMBAT.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	123
BAB 8	125
MEMPOLITISASI KOTA HIBRID: MEDIA BERBASIS LOKASI DAN DEMOKRASI DIGITAL DI INDONESIA.....	125
PENDAHULUAN.....	126
KONEKSI, RUANG DAN TEMPAT.....	129
MOBILITAS DALAM HIDUP PERKOTAAN YANG TERHUBUNG.....	132
MASYARAKAT VIS-A-VIS DEMOKRASI DIGITAL.....	135
KESIMPULAN.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	138
BAB 9	141
MENANGKAL ELIT LOKAL DAN OLIGARKI MELALUI DEMOKRASI EKONOMI.....	141
POLITIK LOKAL DAN SUBORDINASI PUBLIK.....	142
ELIT DAN TUMBUHNYA OLIGARKI.....	145
PELUANG DEMOKRASI EKONOMI.....	148
AGENDA EKONOMI KERAKYATAN MENUJU KONGLOMERASI SOSIAL.....	151
DAFTAR PUSTAKA.....	157
BAB 10	161
MENELISIK KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA.....	161
KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA.....	162
PILIHAN RASIONAL DALAM KEBIJAKAN PUBLIK.....	167
KEBIJAKAN COVID-19: MENYELAMATKAN APA? DAN SIAPA?.....	173
DAFTAR PUSTAKA.....	179
BAB 11	181
NURDIN ABDULLAH: SANG PEMUTUS DOMINASI POLITIK DINASTI DAN PARTAI GOLKAR MELALUI PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN 2018.....	181
MENGANALISIS MODAL SOSIAL DALAM MEMUTUS DOMINASI POLITIK DINASTI DI SULAWESI SELATAN.....	182
NARASI MODAL SOSIAL NURDIN ABDULLAH (NA).....	183
PROLOG PERJALANAN KARIET POLITIK NA.....	183
SKETSA PEMIKIRAN BOURDIEU: HABITUS, ARENA DAN MODAL.....	184
MODAL NURDIN ABDULLAH (NA).....	188
TRANFORMASI POLITIK NURDIN ABDULLAH.....	193
PERIODE I: BUPATI BANTAENG 2008 – 2013.....	193
PERIODE II: BUPATI BANTAENG 2013 – 2018.....	195
PERIODE III: GUBERNUR 2018 – SEKARANG.....	198
CATATAN PENUTUP.....	199
DAFTAR PUSTAKA.....	200

BAB 12	201
PERAN MEDIA DALAM MENGAWAL DEMOKRASI.....	201
PENGANTAR	202
PERAN MEDIA DALAM KOMUNIKASI POLITIK	204
STRATEGI MEDIA.....	212
PERAN MEDIA DALAM PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK.....	214
CIRI-CIRI OPINI	214
SIKAP OPINI PUBLIK.....	214
MACAM-MACAM OPINI:.....	214
OPINI DIBENTUK BERDASARKAN :	214
UNSUR-UNSUR OPINI:.....	216
PERAN MEDIA SEBAGAI BENTUK KONTROL DAN KRITIK.....	219
DAFTAR PUSTAKA	223
RIWAYAT HIDUP	225

PRAKATA

Pascatumbangnya rezim Orde Baru yang sentralistik lahir kemudian undang-undang otonomi daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri untuk kepentingan masyarakat luas. Tetapi kita tahu, pada kenyataannya muncul pelbagai macam paradoks yang bertentangan dengan keinginan kebijakan otonomi daerah itu sendiri. Dalam kaitan ini, di banyak daerah bermunculan fenomena dinasti politik, oligarki lokal, politik transaksional, perilaku koruptif pejabat daerah, dan lain-lain. Para elit lokal biasanya memanfaatkan jabatan sosial, karisma, jaringan akar rumput, atau dukungan dari perusahaan tertentu dalam upaya merebut kekuasaan di daerah. Dengan kata lain, pesta demokrasi di daerah hanya sekadar seremonial peralihan kekuasaan dari satu aktor ke aktor berikutnya dengan masih berputar-putar di lingkaran dinasti dan oligarki lokal. Inilah paradoks implementasi otonomi daerah yang saat ini masih menjadi tantangan bagi masyarakat di daerah dan demokrasi lokal.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan (*book chapters*) yang mengulas tentang bagaimana praktik demokrasi di tingkat lokal, baik pada kajian yang sifatnya konstruktif maupun destruktif. Semua tulisan yang ada dalam buku ini mengeksplorasi fenomena-fenomena demokrasi pada aras lokal dengan memotret dari pelbagai macam sudut pandang. Buku ini hadir sebagai respon dari para penulis yang sangat *compatible* untuk kalangan akademisi, peneliti, yang memfokuskan diri pada kajian demokrasi, politik lokal, maupun kepartaian. Juga untuk para mahasiswa di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, para politisi, pengamat, serta masyarakat umum yang memiliki minat untuk mengetahui sepak terjang demokrasi baik di tingkat lokal maupun nasional.

Kami berterima kasih kepada Dekan FISIP IPDN (Muhammad Labolo) yang telah mengantarkan buku ini dengan sangat lugas dan menarik. Kepada para kontributor, yang tidak hanya sabar melakukan umpan balik

selama proses penerbitan buku ini melainkan juga membuat buku ini bisa hadir ke hadapan sidang pembaca. Serta terima kasih kepada Taufiq Abdul Gani selaku Kepala Unsyiah Press, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami sebagai editor, serta tim Syiah Kuala University Press yang terlibat yakni Karla Amelia, Cut Rita Zahara, Sayed Jamaluddin, Haris Mustaqin, dan Cut Siti Raihan yang telah banyak membantu dalam hal teknis sehingga buku seri pertama “Demokrasi dan Otonomi Daerah” ini bisa mewujudkan sedemikian rupa.

Editor

Moh. Nizar: Universitas Lampung

Wais Alqarni: Universitas Syiah Kuala

KATA PENGANTAR

Mengawali pengantar ini saya ingin mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Sdr. Wais Alqarni, seorang dosen muda dan energik di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Aceh, yang dengan tiba-tiba menyodorkan tawaran untuk memberikan pengantar pada buku setebal 240 halaman di tangan pembaca. Jujur saja kesulitan pertama adalah bagaimana menyempatkan waktu untuk membaca dalam waktu 10 hari, sekaligus menyusun abstraksi sesingkat mungkin guna mengantarkan pembaca menjelajahi bagian demi bagian dalam buku ini.

Buku *Dinasti Politik dan Demokrasi Lokal* memiliki ragam perspektif tidak saja pada judul, juga spirit yang dikandung, serta pesan utama yang ingin disampaikan. Ibarat pelangi, paduan sekumpulan warna menimbulkan daya tarik kuat untuk dinikmati, atau memilih warna terbaik untuk di pandang. Perjumpaan antara dinasti politik dan demokrasi lokal tentu mencerminkan banyak hal. Fenomena dinasti politik kini semakin memperlihatkan eksistensinya, setelah sebelumnya tenggelam oleh topan reformasi. Sejak 1998, Orde Baru dengan semua perilaku negatif yang dikenakan kepadanya, baik korupsi, kolusi maupun nepotisme berangsur-angsur dikecilkan dan diberantas. Ratusan sistem didesain secepat-cepatnya untuk menghalau laju korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejumlah lembaga dikonstruksi untuk membatasi tumbuh dan berkembangnya perilaku Orde Baru yang dianggap gagal membawa Indonesia tinggal landas.

Malangnya, 22 tahun pasca reformasi dilalui kita belum memperlihatkan satu loncatan indah menuju keadaban kolektif. Reformasi seperti menerima kutukan atas semua agenda yang dipertaruhkan ketika menggulingkan rezim Soeharto. Atribut korupsi, kolusi dan nepotisme kini menyebar bahkan menurun dari generasi tua ke generasi muda. Laksana pandemi yang terus melonjak, gejala korupsi, kolusi dan nepotisme tak

pernah berkesudahan. Menurut TII (2020), ranking korupsi Indonesia turun tiga point menjadi 102 dari 108 negara. Di regional Asia Tenggara, Indonesia bahkan berada di bawah Singapura, Brunai, Malaysia dan Timor Leste. Kondisi itu tentu saja dibarengi oleh praktek kolusi antara penguasa dan pengusaha. Sokongan penuh kaum kapital dari entitas pemerintahan terkecil hingga puncak kekuasaan membuat pemerintahan kehilangan fokus, kecuali melayani kaum oligarkhi dan dirinya sendiri. Perbuatan tak etis semacam itu setidaknya diakui oleh Ketua KPK (Firly Bahuri) dan Menkopolkam (Mahfud MD) bahwa pihak swasta dan para cukong mengambil bagian yang tak sedikit sekaligus menjerumuskan para penguasa lokal ke meja hijau.

Atribut ketiga yang menandai kembalinya perilaku Orde Baru adalah tumbuhnya nepotisme sekalipun malu-malu di tengah hiruk-pikuk demokrasi lokal. Jika dimasa Orde Baru nepotisme terlihat telanjang di puncak kekuasaan lalu menjalar ke daerah. Kini penyakit tersebut merangkak perlahan dari daerah menuju puncak kekuasaan. Dengan mengandalkan akses pada kekuasaan puncak, sejumlah kandidat yang terhubung secara dinasti memanfaatkan momentum untuk melakukan loncatan acak agar sesegera mungkin duduk di tampuk tertinggi. Kendatipun amanah reformasi telah mendorong terbentuknya sistem pencegahan nepotisme melalui undang-undang pemilukada, faktanya semua argumen yang telah disusun rapi untuk menghalau dominasi kekuasaan di tingkat lokal berakhir di meja Mahkamah Konstitusi lewat perlawanan apik salah satu dinasti terkuat di Provinsi Sulawesi Selatan. Padahal semenjak jatuhnya dinasti politik Orde Baru, sejumlah dinasti politik di daerah seperti Provinsi Banten turut rontok seperti daun berganti di musim kemarau.

Politik dinasti tentu subur ketika inang pembuahannya memberi kesempatan untuk beradaptasi. Demokrasi lokal adalah inangnya, tempat dimana politik dinasti diseleksi penuh kepura-puraan. Pelanggengan kekuasaan berdasarkan ikatan kekeluargaan seakan menutup kompetisi bagi kandidat terbaik di tengah masyarakat. Demokrasi lokal selain menjadi wadah bagi transaksi *demand & supplay* juga ditentukan nilainya oleh sekelompok oligarkhi yang dipadati relasi nepotisme, logistik, dan keamanan. Keinginan melahirkan satu pemerintahan ideal yang ditata oleh para reformis seperti kehilangan arah, bahkan kehilangan spirit yang melatarbelakangi maksud kolektif guna membatasi meluasnya politik dinasti, sekaligus meletakkan pondasi bagi tumbuh-kembangnya demokrasi di tingkat lokal.

Di tengah keputusan kita dalam mengubur masa depan politik dinasti serta upaya keras mengawal dinamika demokrasi lokal agar tak menimbulkan goncangan keras di berbagai wilayah, kita seperti diajak membandingkan nasib akhir kedua isu itu lewat populisme Hasan Tiro yang menghantarkan spirit nasionalisme Indonesia ke etnonasionalisme Aceh. Dengan merujuk pada populisme Levistky dan Loxton (2013), personifikasi Hasan Tiro telah mengintegrasikan *problem*, *influence*, dan *basis massa*. Kesediaan mengelola realitas lokal sebagai isu sekaligus bentuk pertukaran politik bagi masa depan Aceh telah menempatkan posisi Hasan Tiro sebagai sosok paling dicari oleh pemerintah pusat di masa itu. Sementara kemampuan mendekatkan jarak historis Aceh yang panjang dengan semua kegemilangan dari aspek tradisi kekuasaan lokal, agama, dan semangat perlawanan terhadap penjajah telah memancarkan pengaruh kuat bagi upaya menyatukan semua perbedaan di hadapan pemerintah pusat. Kedua karakteristik itu pada akhirnya bermuara dan efektif membangun kohesi sosial di basis massa yang memosisikan Aceh sesuai janji semula, berlakunya syariat Islam.

Di penghujung kini, populisme Hasan Tiro yang mengandung spirit dan amanah besar bagi masa depan Aceh perlahan mengalami penyusutan. Kekuasaan sebagai alat untuk mendekorasi apa yang menjadi cita-cita luhur bagi Aceh tampak ditransformasikan kedalam kepentingan yang menurut Fernanda & Alqarni (2021) bersifat eksklusif, dinastik, klientalistik, primordial, dan berjarak (*patronase*). Sejalan dengan pesimisme terhadap politik dinasti dan masa depan demokrasi lokal, idealisme Hasan Tiro pun mengalami distorsi atas nama berbagai alasan pragmatis. Mungkin ini semacam siklus yang terus berputar sebagaimana kesuraman atas masa depan demokrasi yang pernah ditulis pula oleh Steven Levistky dan rekannya yang lain, Daniel Ziblatt (2018), *How Democracies Die*.

Mudah-mudahan buku ini memberi banyak manfaat karena ada banyak warna dan sudut pandang yang membuat kita tak cepat bosan untuk berpindah dari satu isu ke isu selanjutnya. Demikian, wassalam.

Dekan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN

Muhadam Labolo

BAB 9

MENANGKAL ELIT LOKAL DAN OLIGARKI MELALUI DEMOKRASI EKONOMI

Penulis
Dodi Faedlulloh

POLITIK LOKAL DAN SUBORDINASI PUBLIK

Dinamika politik lokal Indonesia selalu aktual diperbincangkan dalam praktik dan diskursus publik. Pasca reformasi, pintu demokrasi terbuka lebar dan konsep desentralisasi dibangun sebagai kritik terhadap sistem pemerintahan Orde Baru yang sentralistik. Kini daerah diberi kepercayaan penuh melalui desentralisasi sebagai upaya membangun demokratisasi di aras lokal. Namun, realitanya, dengan hadirnya desentralisasi tidak otomatis akan mendukung berjalannya demokratisasi di aras lokal, yang ada justru lahirlah “raja-raja kecil” yang terdesentralisasi. Alih-alih terciptanya pengembangan daerah secara mandiri melalui desentralisasi, daerah justru menjadi medan pertarungan para elit politik lokal.

Kekuasaan di daerah yang dikuasai secara monopolistik menjadi catatan hitam praktik desentralisasi di Indonesia. Alhasil, desentralisasi malah menjadi identik dengan oligarki di aras lokal. Sederhananya, desentralisasi yang dimanfaatkan para elit politik menjadi permasalahan baru (Chalik, 2017). Oligarki di tataran lokal justru hadir pasca menguatnya desentralisasi yang disebabkan oleh transformasi kelembagaan lokal setelah era reformasi yang tidak diiringi dengan transformasi tatanan dari rezim sebelumnya. Hal ini mensituasikan para oligark lama mampu bertahan, bahkan membangun jejaring oligarki baru di tataran lokal (Hadiz & Robinson 2014).

Menurut studi Agustino & Yusoff (2010) ada dua hal penting yang muncul dari dinamika politik lokal di Indonesia, yakni; pertama, pengendalian pusat atas politik lokal yang disebabkan karena kepentingan terhadap akses sumber daya lokal yang besar; kedua lahirnya *local strongmen* yang disebabkan karena alasan yang pertama. Namun dua hal tersebut tidak memberikan dampak positif dalam keberlangsungan hidup masyarakat karena karakternya yang tetap bersifat elit. Ada beberapa konteks yang selalu berkelindan menyelimuti politik lokal, yakni subordinasi dan dominasi elit lokal, bahkan agensi oligark. Di beberapa daerah, bahkan pemerintahan dikuasai oleh dinasti keluarga. Bisa jadi, kondisi demikian terjadi telah melalui proses yang demokratis secara politik formal. Namun, sekali lagi kondisi tersebut tidak memberi dampak positif bagi masyarakat. Masyarakat akhirnya menjadi objektifikasi politisasi elit lokal dan oligark, karena masyarakat tidak mendapatkan akses terhadap kekuasaan dan turut mengontrol dan mengelola hal ihwal yang bersifat kepentingan publik. Hal ini menjadi habitus menjemukan dalam perpolitikan di aras lokal. Sayangnya, masyarakat seringkali tidak memiliki akses untuk

menginterupsi kondisi demikian karena *power gap* antara masyarakat dan elit lokal. Bahkan tidak sedikit kasus, berdasarkan pelbagai pengalaman, para elit dan oligark selalu memiliki intrik dan siasat untuk mempertahankan kekuasaan sekaligus kekayaan mereka dengan sangat “baik”.

Politik lokal merupakan aspek politik di level mikro secara teritorial, sosial maupun administratif yang menjadi dasar dari konstruksi politik di level makro. Unsur utama dari politik nasional adalah politik lokal itu sendiri. Dengan kata lain, bangunan politik nasional disangga oleh politik lokal (Halim, 2014). Sebagai penyangga, maka politik lokal harus ditempatkan dalam konteks tujuan yang lebih luas; untuk kemajuan politik dan demokrasi dalam lingkup nasional. Membicarakan politik lokal berarti membicarakan masa depan politik nasional juga. Memperbaiki kualitas politik lokal berarti merupakan ikhtiar dalam menanam bibit-bibit demokrasi agar menghasilkan buah demokrasi yang lebih unggul dan emansipatif. Dinamika politik lokal yang sedang berproses dalam upaya demokratisasi seringkali menemui kendala. Mulai dari politik transaksional, patronase, demokrasi semu, sampai pembajakan demokrasi oleh elit lokal dan oligark.

Ketika demokrasi dibajak oleh elit dan oligark, mereka akan memanfaatkan momen tersebut untuk memenuhi kepentingannya. Mereka akan menjadi pelaku utama dalam kehidupan politik. Elit selalu memiliki kewenangan dalam memutuskan keputusan politik (Mosca, 1939). Studi yang dilakukan Zuada et al., (2016) menunjukkan temuan penting bahwa keberadaan elit politik dan elit ekonomi sering menjadi elit penentu di era otonomi daerah. Mereka bertransformasi menjadi oligarki yang bersifat predatoris melalui pelibatan diri dalam upaya mempertahankan serta mengakumulasi kekayaan material melalui klik bisnis yang dikelola. Studi dari Ananta (2016) memperkuat temuan di lapangan bahwa praktik politik oligarki selalu diiringi dengan cara kerja dari jaringan kekuasaan yang bersifat predatoris. Kehadiran kelompok *politico-business* menjadi penanda dalam politik oligarki. Mereka menggunakan kekuasaan negara untuk mengakumulasi kekayaan material, pemanfaatan relasi patronase dalam aliansi elit ekonomi dan politik, pemakaian politik transaksional pada kontestasi lokal, pengerahan kekerasan non-negara melalui organisasi tertentu demi mempertahankan sumber daya, dan melemahnya kekuatan sosial yang berada di luar jaringan lingkaran kekuasaan oligarki tersebut. Semuanya dilakukan melalui dominasi kekuasaan jejaring lingkaran oligarki guna mendapatkan, mengamankan, bahkan memperbesar sumber daya ekonomi. Situasi tersebut seakan menjadi hal yang selalu di

repetisi dalam politik lokal di Indonesia. Akhirnya publik selalu dalam posisi subordinat. Suara mereka hanya muncul secara formal dalam kotak suara yang dilaksanakan rutin lima tahun sekali.

Kondisi demikian bukan berarti tidak bisa diakhiri. Dalam konteks tertentu, penguasaan uang dan penguasaan lembaga negara yang berjalan dalam politik lokal yang dikuasai elit dan oligark tidak selamanya berbanding lurus dengan banyaknya suara yang diperoleh (Hidayat et al., 2018). Selalu ada potensi, walaupun kecil, yang memungkinkan untuk keluarnya posisi subordinat publik dari kancah politik oligarki. Kemungkinan tersebut perlu diperluas untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. Oleh karenanya proyek politik emansipatif mesti diperluas jangkauannya. Tidak melulu dalam kerangka politik, namun juga perlu mengelaborasi dalam konteks yang lebih material, yakni corak produksi. Dengan kata lain perubahan dalam struktur ekonomi.

Eksperimentasi perubahan sosial melalui jalur ekonomi adalah agenda yang penting, khususnya dalam konteks demokrasi. Dalam lanskap demokrasi, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi adalah hal yang harus berdiri bersama-sama saling menguatkan. Tanpa demokrasi ekonomi, demokrasi politik akan menciptakan oligarki, yakni kekuasaan yang dipegang oleh pemilik sumber daya material yang melimpah, segelintir pihak yang berpatron pada elit-elit politik (Idris, 2012; Faedlulloh, 2016). Oleh karenanya agenda yang perlu menjadi ikhtiar untuk meminimalkan praktik politik oligarki dalam demokrasi lokal adalah mewujudkan demokrasi ekonomi di aras lokal. Dalam hal ini, pemikir ekonomi kerakyatan, Mubyarto (1997) pernah mengingatkan bahwa realisasi dari demokrasi ekonomi yaitu melalui otonomi daerah serta desentralisasi ekonomi, yang bertujuan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi yang bersifat publik justru dapat lebih banyak dilakukan di daerah. Oleh karenanya, daerah, atau dalam konteks ini politik lokal adalah kunci dari keberhasilan terciptanya demokrasi ekonomi. Bila daerah bisa mengambil posisi dalam keputusan-keputusan ekonomi yang penting dan bersifat publik, maka demokrasi ekonomi dalam lingkup nasional semakin mungkin terwujud. Demokrasi ekonomi di tingkat lokal akan menjadi rangkaian *puzzle* yang menyusun gambaran besar tentang kesejahteraan bersama rakyat Indonesia.

Melalui tulisan ini, penulis melakukan kontribusi gagasan konseptual dalam upaya merehabilitasi kondisi politik lokal di Indonesia yang selalu disubordinasi oleh elit dan oligark. Dalam artikel ini, alih-alih memberikan masukan tentang politik praktis, penulis lebih merekomendasikan

demokrasi ekonomi sebagai proses lawan tanding untuk mereduksi dominasi elit dan oligarki di aras demokrasi lokal. Hal ini penting dijelaskan guna menyeimbangkan diskursus demokrasi di Indonesia karena tanpa demokrasi ekonomi, demokrasi politik akan berjalan pincang. Hal ini pula yang seringkali luput dalam perdebatan demokrasi di Indonesia. Tanpa adanya agenda redistribusi ekonomi (melalui demokrasi ekonomi), maka politik elit dan oligarki akan tetap berdiri tegak.

ELIT DAN TUMBUHNYA OLIGARKI

Keberhasilan demokrasi pada dasarnya berbicara tentang sejauh mana kebijakan dan praktik politik yang ada mampu berkontribusi nyata pada terciptanya kesejahteraan bersama bagi seluruh masyarakat Indonesia yang didasarkan pada asas keadilan sosial. Bila kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat tidak tercapai, maka ada permasalahan yang perlu ditelusuri dari praktik demokrasi. Praktik demokrasi pun tidak menutup kemungkinan justru melahirkan dan memperkuat elit dan oligarki. Hal inilah yang terjadi secara vulgar di Indonesia. Semakin berkembangnya sistem demokrasi malah membuat oligarki semakin menguat. Lemahnya supremasi hukum menjadi faktor dari menguatnya oligarki. Menurut analisa Winters (2011), proses penegakan hukum di Indonesia tidak berfungsi bila menghadapi kasus-kasus yang berhubungan dengan para oligark.

Elit dan oligarki adalah hal yang berbeda. Elit belum tentu oligarki, namun oligarki pasti adalah bagian dari elit. Walaupun sama-sama didasarkan pada pemanfaatan kekuasaan dan pengaruh minoritas, tetapi jenis kekuasaan yang menjadi dasar cukup berbeda. Implikasinya, hal ini menentukan pada hasil politik yang bisa berbeda. Dalam istilah Laswell, elit merupakan kelompok kecil yang memperoleh dan mempunyai hal ihwal lebih dari apa yang diperoleh dan dipunyai oleh orang lain. Sedangkan Pareto membaca elit sebagai segelintir pihak yang memperoleh dan mempunyai hal ihwal lebih dari yang lain, baik yang memegang kekuasaan secara langsung ataupun yang berada di luar kekuasaan (Varma, 2007).

Jenis kekuasaan yang mencakup hak politik formal, jabatan formal, kuasa paksaan, dan kekuatan mobilisasi merupakan sumber daya yang ketika didistribusikan secara eksklusif akan menjadi jangkar bagi praktik politik “elit.” Sedangkan, sumberdaya ekonomi merupakan fondasi dari oligarki. Dalam hal ini, oligarki memiliki “kelebihan” tersendiri dibandingkan dengan elit, karena sumber daya material yang menjadi basis oligarki dapat dikonversi menjadi berbagai bentuk kekuasaan lainnya (Winters, 2011).

Namun ada satu nafas yang sama dalam selubung dua entitas tersebut, yakni laku dominasi dalam politik. Mereka adalah aktor yang memiliki berbagai sumberdaya yang mumpuni serta tidak jarang berjejaring secara kuat untuk saling mendukung dan saling mempertahankan kekuasaannya.

Dalam konteks politik lokal, oligarki pun tumbuh subur dan turut menubuh dalam sistem politik, baik yang terjun langsung secara formal maupun mengambil fungsi kekuasaan informal. Keduanya saling menghidupi. Ketika ada elit yang dihidupi oligarki, maka aktivitas kepemimpinan politiknya tiada lain hanya untuk memberikan imbalan-imbalan setimpal dengan berbagai fasilitas khusus, penjaga keamanan atau proyek tertentu yang bisa memperkuat kekayaan oligark. Meskipun memiliki kesamaan dalam hal struktur formal dari demokrasi elektoral, pada situasi tertentu antara elit dan oligarki saling bercampur bertumpang tindih. Kuasa oligarki berpotensi mengarah pada kuasa elit atau sebaliknya, kuasa elit yang mendorong lahirnya kekuasaan oligarki. Namun, tidak menutup celah kemungkinan tercipta kondisi ketika para oligark justru mempunyai sumber daya ekonomi saja, serta para elit tidak dapat mengakumulasi sumberdaya ekonomi yang dapat mendatangkan kekuasaan bagi mereka. Apapun yang terjadi dari hasil politik oligarki dan elit, bila siklus tersebut tidak terputus, maka lagi-lagi masyarakatlah yang menjadi korban.

Membicarakan dan mengartikulasikan oligarki menjadi agenda yang sangat penting, khususnya kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat tentang kompleksitas fenomena situasi ekonomi politik terkini di Indonesia. Dalam konteks tersebut, studi dari Winters (2011) dan Hadiz & Robison (2014) layak menjadi rujukan utama dalam membicarakan oligarki di Indonesia. Hampir semua riset dan kajian tentang dinamika oligarki di Indonesia merujuk pada karya mereka sebagai basis teoritis yang membantu dalam kerangka analisis.

Berbicara mengenai oligarki tidak hanya bisa ditinjau dari aspek sumber daya ekonomi saja, tapi sangat berhubungan dengan relasi kekuasaan (Kusumaningtyas et al., 2017). Menurut Hadiz & Robinson (2014) oligarki yaitu sistem relasi kekuasaan yang mengkondisikan perlindungan atas kekayaan dan kekuasaan yang terkonsentrasi kepada segelintir pihak. Ada sifat kolektif dalam jejaring yang dibentuk oleh oligarki yang ditujukan untuk akumulasi sumber daya material dan mampu menguasai politik.

Di sisi lain, Winters (2011) menempatkan oligarki pada dua dimensi, yakni dimensi dasar kekuasaan dalam bentuk kekayaan material dan

dimensi jangkauan kekuasaan yang sangat luas dan bersifat sistemik. Jadi, walaupun berjumlah sedikit, bahkan minoritas, oligarki tetap memiliki kuasa dan dominasi yang kuat.

Oligarki tidak bersifat tunggal, ia memiliki ragam bentuk dan model. Dalam hal ini Winters (2011) mengelaborasi secara mendalam model-model dari oligarki, yaitu 1) Oligarki panglima yang berciri pada penggunaan kekerasan secara langsung melalui pemaksaan. Akumulasi kekayaan dilakukan dengan cara penaklukan di antara para oligarki panglima; 2) Model oligarki yang bersifat penguasa kolektif bukan personal. Kerjasama antara para oligark terjalin untuk mempertahankan sumber daya material mereka serta memerintah komunitas tertentu; 3) Oligarki melalui instrumen pemaksaan yang dimonopoli individu penguasa sehingga tercipta kondisi patron klien kepada individu yang sedang berkuasa. Model ini mengkondisikan pihak individu sebagai penguasa utama. Dalam model ini, oligark lain menggantungkan pertahanan kekayaan pada oligark tunggal tersebut. Model oligarki ini disebut sebagai oligarki sultanistik. Menurut Winters, pemerintahan Orde Baru yang dikuasai oleh individu Soeharto sebagai penguasa adalah contoh dari oligarki sultanistik. Selanjutnya, 4) Oligarki sipil, yakni para oligark yang tidak memiliki senjata dan tidak memilih duduk sebagai penguasa langsung secara formal, tetapi perannya sangat menentukan dalam politik.

Disisi lain, Robison & Hadiz (2004) menawarkan paradigma yang berbeda dengan pemikiran Winters. Bila Winters (2011) menjelaskan bahwa oligarki merupakan perkara politik pertahanan sumber daya ekonomi antara segelintir pihak yang super kaya, Robinson & Hadiz membaca oligarki dalam lanskap sistem politik yang ditopang relasi kekuasaan yang memungkinkan adanya konsentrasi sumber daya ekonomi dan kuasa serta transformasi kolektif atas konsentrasi tersebut. Implikasinya, eksplanasi Winters menafikan peran kolektif karena didasarkan pada pandangan bahwa oligarki bertumpu pada individu, beda halnya dengan pemikiran Robinson & Hadiz yang menjelaskan bahwa oligarki merupakan jejaring relasi kekuasaan yang saling berkelindan.

Oligarki yang dipelihara Orde Baru menemukan kembali eksistensinya pasca reformasi. Para oligark dapat kembali eksis karena problem disorganisasi masyarakat sipil sebagai warisan sosial dari eksekutif negatif puluhan tahun pemerintahan Orde Baru yang otoriter. Robinson & Hadiz menjelaskan proses reorganisasi dari oligarki di Indonesia dilaksanakan di dua bidang, yaitu ekonomi dan politik secara bersamaan. Faktor

berhasilnya reorganisasi tersebut adalah faktor kelenturan jejaring kuasa politik serta kepentingan ekonomi yang menjadi penanda oligarki yang menjalar di dalam tubuh institusi-institusi yang dimiliki negara. Untuk mempertahankan diri, jaringan oligarki mengoptimalkan ruang yang disediakan dalam proses desentralisasi di Indonesia. Jaringan oligarki lama yang didukung oleh kekayaan yang melimpah berupaya tetap menjadi kekuatan utama di aras lokal. Hal tersebut dapat berjalan dengan cara penguasaan terhadap partai politik, menggunakan politik transaksional dan politik uang, dan memobilisasi kekerasan non-negara untuk memenuhi kepentingan mereka.

Membaca situasi politik oligarki dan elit di atas ada implikasi penting yang perlu menjadi perhatian, yakni terkait kekayaan material (ekonomi) yang dimiliki segelintir orang. Oleh karenanya, pembalikan dari situasi tersebut adalah menciptakan kondisi kekayaan material yang lebih merata dan berkeadilan. Untuk itu, selanjutnya perlu didiskusikan tentang bagaimana langkah yang perlu diupayakan agar kondisi pembalikan tersebut bisa tercapai.

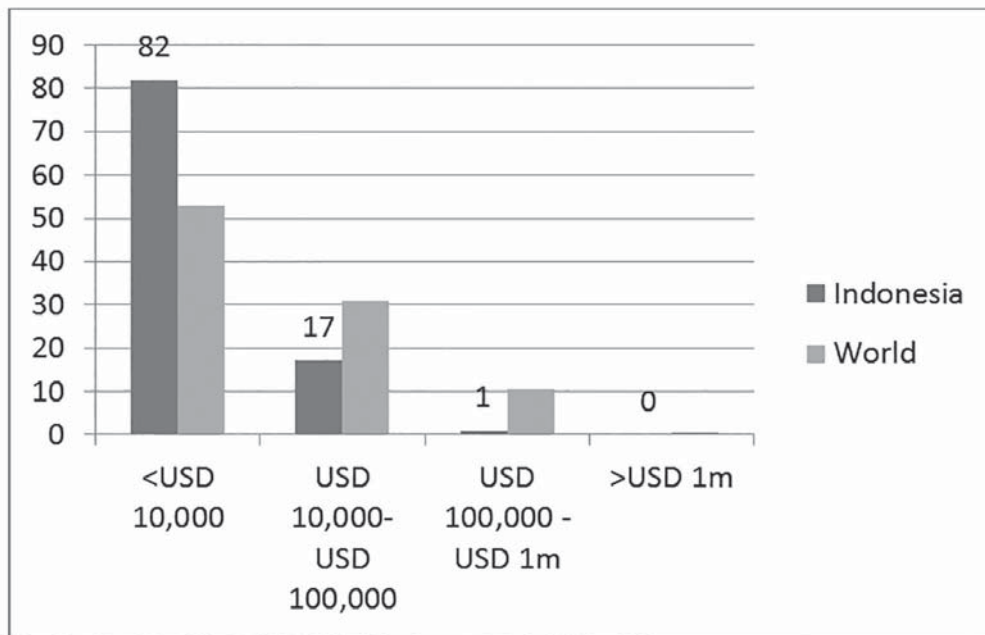
PELUANG DEMOKRASI EKONOMI

Salah satu indikator demokratisasi lokal yang disusun oleh O'Donnell, (2004) yaitu indikator tentang demokrasi lokal yang berhubungan dengan ekonomi dan usaha, ditandai dengan hadirnya inisiatif untuk memajukan para pelaku ekonomi bisa melakukan usaha secara adil dan setara. Dalam konteks ini, demokrasi ekonomi adalah alternatif yang perlu diperjuangkan untuk bisa memenuhi indikator tersebut guna mewujudkan demokratisasi lokal yang substansial.

Demokrasi ekonomi di Indonesia masih jadi tema yang jarang didiskusikan baik secara akademik maupun praktik lapangan. Padahal bila membaca ekonomi konstitusi Indonesia sangat bernafas demokratis yang diperuntukkan untuk kepentingan rakyat banyak. Namun realitas berbicara lain, hal ini ditunjukkan dengan kondisi ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia yang masih tinggi yang secara inheren bisa menjadi ancaman bagi kehidupan demokrasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan atau rasio gini di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 0,381 atau melebar ketimbang rasio gini September 2019 sebesar 0,380. Angka tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan di Indonesia masih tinggi. Sedangkan berdasarkan laporan lembaga riset internasional Credit Suisse (2019), 82 persen dari 173 juta orang dewasa Indonesia hanya memiliki

kekayaan di bawah 10.000 dollar Amerika. Jauh diatas rata-rata dunia yang hanya 58 %. Sementara itu, hanya 1,1 % dari orang dewasa yang memiliki kekayaan di atas 100.000 dolar Amerika. Jauh di atas rata-rata dunia yang angkanya hingga 10,6 %. Dipertegas dalam laporan tersebut, hanya 1% dari penduduk Indonesia yang menguasai 45 % kekayaan Indonesia.

Gambar 1. Distribusi Kekayaan Relatif Terhadap Dunia (Dalam Persen)



Sumber: Credit Suisse (2019)

Selanjutnya laporan dari World Bank (2020) menunjukkan terdapat 115 juta rakyat Indonesia dalam kondisi yang rentan miskin, yang mana bila tercipta kegoncangan ekonomi seperti yang terjadi saat ini karena pandemi Covid-19, separuh warga Indonesia bisa langsung menjadi miskin. Dari simulasi yang dibuat oleh para peneliti Aulia et al. (2020) menunjukkan bila pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sampai nol persen karena faktor pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, maka angka kemiskinan bisa meningkat sampai 10,54% atau setidaknya 3,63 juta penduduk akan terjun ke dalam kemiskinan. Berarti data orang miskin yang tercatat pada September 2019 sebanyak 24,79 juta orang bisa semakin bertambah.

Ketimpangan dalam distribusi pendapatan merupakan refleksi dari kondisi ketimpangan dalam distribusi aset produktif. Dari kepemilikan aset produktif menghasilkan pendapatan (Wie, 1981). Semakin besar

seseorang menguasai aset produktif, semakin besar klaimnya terhadap pendapatan. Ketimpangan adalah problem dari krisis demokrasi yang harus disikapi secara serius. Kondisi ini berpotensi menjadi bom waktu bagi masa depan Indonesia. Untuk menjembatani ketimpangan tersebut dibutuhkan kebijakan negara (Djojohadikusumo, 1975). Intervensi, dalam arti posisi negara turun tangan (bukan campur tangan) diperlukan. Dalam situasi ini, demokrasi ekonomi menemui relevansinya sebagai gagasan dan proyek transformasi sosial yang perlu didorong untuk dilaksanakan di Indonesia guna merehabilitasi sistem ekonomi Indonesia yang sangat kapitalistik.

Pembahasan mengenai demokrasi ekonomi yang dilakukan oleh para pakar sosial kembali menghangat di tahun 1970-an. Namun, secara historis, nilai dari demokrasi ekonomi sudah melekat dalam praktik gerakan koperasi modern yang mulai tumbuh kembang di abad ke-18. *Founding father*, Moh. Hatta pernah menjelaskan tentang pentingnya demokrasi ekonomi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Menurut Moh Hatta, dalam dirinya ekonomi harus memiliki aspek-aspek sosial (Faedlulloh, 2016).

Demokrasi ekonomi menurut Swasono (2008) pada dasarnya telah ditegaskan melalui UUD 1945 Pasal 33 ayat 1-3 berikut penjelasannya. Cita-cita luhur dari demokrasi ekonomi yaitu merealisasikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dengan mengambil posisi keberpihakan dengan melakukan pemberdayaan kepada yang miskin, marjinal, lemah, dan terbelakang. Keadilan sosial adalah hasil dari kerja produktif dan kesempatan yang egaliter sehingga setiap orang mampu menggunakan seluruh kapasitasnya untuk bekerja dan memperoleh imbalan yang adil dari hasil usahanya (Karimi, 2010).

Menurut pandangan ahli ekonom kerakyatan, Mubyarto (1994) menempatkan demokrasi ekonomi dalam konteks Indonesia sebagai bentuk manifestasi dari ekonomi Pancasila atau ekonomi kekeluargaan. Adapun konsep ekonomi Pancasila memiliki karakter yang diturunkan dari sila-sila Pancasila, yakni 1) perekonomian digerakkan oleh stimulus ekonomi, sosial dan juga moral, 2) adanya kehendak bersama dari seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan kondisi pemerataan sosial ekonomi, 3) adanya prioritas kebijaksanaan ekonomi merupakan pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh, dengan kata lain jiwa nasionalisme selalu ada dalam setiap kebijaksanaan ekonomi, 4) koperasi merupakan sokoguru ekonomi nasional, 5) adanya perimbangan

yang jelas antara sentralisme dan desentralisme kebijaksanaan ekonomi sebagai penjamin terciptanya keadilan ekonomi dan keadilan sosial, sekaligus menjaga prinsip dasar efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

Sritua Arief (2002) menjelaskan demokrasi ekonomi sebagai manifestasi keadilan dalam aspek produksi serta alokasi hasil dari produksi. Demokrasi ekonomi menyertakan rakyat dalam setiap proses pembangunan. Pada dasarnya, dalam mewujudkan demokrasi ekonomi, kesempatan diberikan seluasnya kepada rakyat untuk mengkreasi kekayaan dengan memperoleh akses yang setara dan adil atas sumber daya ekonomi. Sederhanya, demokrasi ekonomi merupakan pengaturan sosial ekonomi yang dikelola dan dikendalikan secara demokratis. Pasar dalam paradigma demokrasi ekonomi tidak dilihat sebagai musuh, tetapi dalam menjalankan aktivitas ekonomi titik tekannya tidak pada maksimalisasi motif profit seperti kapitalisme dalam setiap pembuatan keputusan ekonomi (Luviena et al., 2010).

Dari penjelasan tentang konsepsi demokrasi ekonomi di muka, menunjukkan bahwa demokrasi ekonomi memiliki substansi penting untuk membuka pintu kesejahteraan menjadi lebih luas. Dalam konteks demokrasi lokal, demokrasi ekonomi bisa menjadi penyeimbang dari demokrasi politik yang saat ini seringkali berjalan secara prosedural semata. Demokrasi ekonomi bisa mengoreksi sistem ekonomi politik di aras lokal.

Bagaimanapun politik lokal adalah ruang yang akan terhubung dengan politik nasional. Bila, permasalahan di level lokal tidak terselesaikan, bahkan tidak terkendali, maka tidak menutup kemungkinan merambat ke level nasional. Hal ini menjadi gejala pembusukan demokrasi di Indonesia.

AGENDA EKONOMI KERAKYATAN MENUJU KONGLOMERASI SOSIAL

Setelah otonomi daerah berjalan, perubahan memberikan gairah dan devisa yang berkontribusi dalam proses pemerataan pembangunan di daerah. Namun, bila ekonomi yang berjalan diorganisasikan berdasarkan kepentingan elit dan oligark, maka misi pemerataan akan tersumbat. Oleh karenanya, gerakan perlawanan politik terhadap dominasi elit dan politik oligarki di aras lokal selama ini harus diintegrasikan dengan perubahan platform corak produksi; bagaimana ekonomi diorganisasikan.

Untuk menginterupsi hegemoni elit dan oligark, Gaventa (2005; 2006) merekomendasikan kepada kelompok intelektual maupun organisasi

non-pemerintah berbasis masyarakat di aras lokal yakni dengan terus mendidik masyarakat untuk terus menerus berpikir dan bertindak kritis yang ditindaklanjuti dengan proses mobilisasi massa rakyat untuk merobohkan skenario gelap dari aliansi antara elit dan oligark. Gerakan mobilisasi harus bersifat kolaboratif, tidak sendiri-sendiri berdasarkan isu atau *concern* masing-masing semata. Agenda meruntuhkan politik oligarki adalah melakukan perlawanan terhadap dominasi kekuasaan material yang menjadi sumber daya para oligark. Oleh karenanya, penulis merekomendasikan satu proyek politik transformasi sosial dalam format demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah alternatif yang perlu di eksperimentasi secara kolektif untuk membatasi ruang gerak oligarki. Tujuan dari demokrasi ekonomi adalah memberikan kemungkinan kepada masyarakat luas untuk mengkreasi kekayaan sehingga tidak tersentralisasi pada segelintir pihak. Masyarakat lebih berdaya, sehingga bila mencapai titik optimumnya memiliki kekuatan yang mencukupi untuk berkontribusi dalam proses mengorganisir kepentingan publik.

Salah satu turunan dari demokrasi ekonomi adalah membumikan kembali ekonomi kerakyatan. Ekonomi yang dikelola dari, oleh dan untuk rakyat. Ada beberapa hal yang potensial bisa dikerjakan dalam menghidupkan demokrasi ekonomi, salah satunya dengan membangun aktivitas ekonomi dalam format koperasi. Kata koperasi di Indonesia cukup peyoratif karena berbagai permasalahan kesalahpahaman yang turun temurun diwariskan dalam memori masyarakat sebagai bentuk usaha yang gagal. Padahal, koperasi tidak demikian. Koperasi adalah institusi ekonomi strategis yang memiliki kapasitas menjadi penarik dan pendorong seluruh aktivitas ekonomi. Masyarakat dapat menciptakan dan memperoleh nilai tambah dan kesempatan usaha yang lebih besar secara kolektif melalui koperasi (Sastrawidjadja & Adam, 2015). Hal ini dibuktikan dengan tumbuh kembangnya koperasi di berbagai negara lain, yang tidak hanya sebagai alternatif tapi juga menjadi kekuatan utama. Melalui koperasi, kepemilikan ekonomi dapat diperluas karena salah satu prinsip koperasi adalah keanggotan (sebagai pemilik) bersifat sukarela dan terbuka.

Dalam politik riil, masyarakat sipil dianggap sebagai media bagi transformasi politik karena memiliki kekuatan yang bisa menjadi penyeimbang kekuasaan pemerintah dan mencegah hal-hal yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Masyarakat sipil juga dapat berperan sebagai pengawal kepentingan publik dan dapat mencegah

pemerintah dari upaya mendominasi dan memanipulasi masyarakat (Agustino & Yusoff, 2010). Dalam konteks ini, maka gerakan *civil society* bisa ditransformasi menjadi gerakan ekonomi. Melawan dominasi elit dan oligarki dengan membangun organisasi ekonomi kolektif.

Ciri dari sistem ekonomi kerakyatan yaitu tegaknya prinsip keadilan sosial dalam demokrasi ekonomi disertai dengan keberpihakan terhadap pihak-pihak yang lemah. Hal ini dijiwai oleh semangat untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial yang diiringi sikap keberpihakan nyata pada yang lemah merupakan upaya yang sangat penting dalam rangka akselerasi pengentasan kemiskinan serta membatasi konsentrasi sumber daya ekonomi pada segelintir orang. Keberpihakan kepada yang lemah diwujudkan dalam bentuk kemudahan fasilitas, akses terhadap modal, perlindungan sosial, pendidikan kepada masyarakat miskin.

Prinsip keadilan dalam demokrasi ekonomi sebagai ciri sistem ekonomi kerakyatan dapat dilihat dari perkembangan tingkat ketimpangan dan distribusi pendapatan. Jika ketimpangan menurun dan distribusi pendapatan semakin membaik berarti prinsip keadilan dalam demokrasi ekonomi telah mewarnai kehidupan nasional.

Ekonomi kerakyatan bisa didorong sejauh mungkin menjadi konglomerasi baru dengan mengedepankan ekonomi yang berkeadilan. Saat ini, ketika mendengar terma konglomerasi tautologi dengan perusahaan raksasa yang dimiliki korporasi swasta. Padahal, kemungkinan tentang konglomerasi yang non-korporasi swasta sebenarnya terbuka. Praktik-praktik terkini di beberapa negara menunjukkan keberhasilannya dalam membangun konglomerasi sosial. Berbeda dengan konglomerasi korporasi swasta raksasa yang kerap melahirkan oligark, konglomerasi sosial adalah penguasaan hulu dan hilir dari bisnis namun ada di tangan masyarakat secara terbuka dengan konsep setiap satu orang satu suara dalam menentukan kebijakan bisnis dan organisasi (Suroto, 2019).

Konglomerasi sosial yang dipraktikkan oleh koperasi ternyata berkembang di beberapa negara. Di Asia antara lain berkembang di India, Taiwan, Jepang dan Korea Selatan. Di India, konglomerasi koperasi diawali perkembangannya dari Koperasi Petani Tebu Rakyat. Koperasi ini memiliki dan menguasai kepemilikan saham pabrik gula yang mengolah seluruh tebu hasil petani dan memasarkan ke pasar domestik dan global. Sukses Koperasi Petani Tebu tersebut, dicatat sebagai awal yang merupakan cikal bakal Koperasi bergerak menjadi konglomerat. Sedangkan di

Korea Selatan, *National Agricultural Cooperative Federation* (NACF), yaitu koperasi sekunder agribisnis berkembang sebagai konglomerat melalui merger horizontal dan vertikal, yang kemudian merambah pada berbagai lapangan usaha, termasuk bisnis keuangan dan perbankan (Suwandi, 2010). Di Singapura hadir NTUC Fair Price sebagai koperasi besar yang dimiliki masyarakat berhasil membangun konglomerasi sosial. Konglomerasi koperasi dimiliki oleh 800 ribu warga Singapura dan berhasil menguasai pangsa pasar bisnis ritel sampai 73 persen dan sektor strategis lain. Begitupula yang berkembang di Spanyol seperti Mondragon *Worker Co-operative* yang jadi perusahaan terbesar di Basque, Spanyol dan dimiliki 80 ribu pekerjanya secara *equal* (Suroto, 2019).

Sri Lanka memberikan praktik terbaik konglomerasi sosial dengan lahir dan berkembangnya Sanasa Group sebagai koperasi terbesar yang dimiliki 3,9 juta warga dan bergerak di 16 sektor ekonomi strategis. Sanasa Group melaksanakan pemberdayaan berbasis komunitas. Melalui langkah kecil, yaitu pendirian unit koperasi kredit yang beranggotakan 15 sampai 20 orang, kemudian kelompok tersebut mempromosikan gerakan tersebut kepada komunitas lainnya. Ketika secara kelembagaan, kapasitasnya telah memadai, koperasi dikembangkan secara optimal dalam komunitas tersebut. Saat ini Sanasa Group telah menjadi koperasi raksasa yang tidak hanya bergerak di sektor finansial, tetapi juga bergerak di bidang pendidikan, asuransi, perjalanan dan lain sebagainya (Nandi, 2017).

Konglomerasi tidak lantas melanggar jatidiri koperasi untuk menjadi bisnis raksasa. Justru pada kenyataannya, saat ini koperasi selalu diposisikan dan dikondisikan menjadi *usaha bonsai* (Sastrawidjaja & Adam, 2015), sehingga koperasi di Indonesia sulit menjadi perusahaan bersama yang besar. Argumentasi fundamental tentang konglomerasi sosial melalui koperasi yakni ungkapan “bersatu kita teguh bercerai kita runtuh” sebagai ungkapan gotong royong didefinisikan dengan mempersatukan segala sumber daya dan dana dalam skala yang lebih besar sehingga menciptakan *the economy of large scale* serta adanya tatanan yang praktis dan efisien. Aspek ekonomi ini dapat diaplikasikan dari teori tentang biaya produksi dalam cakrawala *law of the large number* yang memunculkan adanya sinergi biaya yang dapat memberikan manfaat tertentu (Mutis, 1992).

Praktik konglomerasi sosial yang tercipta di beberapa negara lain menunjukkan bahwa rakyat bisa menjadi mandiri secara ekonomi dengan memiliki dan mengontrol sumber daya secara kolektif. Dalam hal ini

tepat untuk menjelaskan kembali tentang analisa basis struktur (corak produksi ekonomi) yang menentukan suprastruktur ala Marxian. Ketika masyarakat mampu mengorganisir ekonominya secara kolektif, melalui koperasi dengan kepemilikan bersama oleh para anggota, maka politik sebagai bagian dari suprastruktur akan terbuka untuk bertransformasi sesuai dengan basisnya; yakni ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri.

Perjuangan membangun demokrasi ekonomi membutuhkan nafas panjang. Tidak bisa dilakukan dengan mudah seperti gerakan perlawanan lainnya yang kerap mengeluarkan peluh. Namun, bukan berarti langkah tersebut tertutup sama sekali. Di Indonesia sendiri, ikhtiar tersebut sudah dieksperimenkan di beberapa daerah. Salah satunya yaitu di Sintang, Kalimantan Barat dengan berdirinya Keling Kumang Group (KKG). KKG didirikan 7 Juli 2014 atas respon dari kebutuhan riil anggota unit bisnis yaitu CUKK, YKK, K-52, K77 sebagai lembaga pengikat dan lembaga *think tank* bagi seluruh unit-unit bisnis serta menjalin jejaring secara lokal, nasional dan internasional. Kredit Keling Kumang telah melakukan pemekaran dengan membentuk koperasi di sektor lain dan lembaga-lembaga lainnya dalam naungan group atau *holding*. Secara serius KKG memiliki visi yang sangat tegas dan berani, yakni “Konglomerasi Sosial Untuk Membangun Bangsa dan Misi Kalimantan Tanpa Kemiskinan” (Keling Kumang Group, n.d.). Capaian ini layak diapresiasi sebagai ikhtiar demokrasi ekonomi di aras lokal. Gerakan yang dilakukan oleh KKG menunjukkan koperasi sebagai jaringan konglomerasi sosial sejatinya berpotensi untuk berkembang di Indonesia. Gerakan ini penting untuk membalikan asumsi dari masyarakat yang selama ini salah paham tentang koperasi yang dikaitkan hanya sebatas usaha simpan pinjam atau urusan bisnis kecil-kecilan (Suroto, 2019). Dalam dirinya, walaupun tidak secara eksplisit dideklarasikan, gerakan yang dilakukan oleh KKG adalah gerakan yang politis. Gerakan yang mencoba mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan yang tiada lain dominasi bersifat struktural dan merupakan problem laten yang sering muncul dari kebusukan politik elit dan oligarki.

Mewujudkan konglomerasi sosial melalui koperasi dapat melindungi kepentingan masyarakat di aras lokal di tengah tantangan deras globalisasi dan kapitalisme karena koperasi dimiliki oleh para anggotanya (Sastrawidjadja & Adam, 2015). Lebih jauh, upaya ini adalah sebetulnya ikhtiar untuk bisa lepas dari kerangkeng politik elit dan oligarki yang sering tumbuh di politik lokal.

Sudah saatnya, aktivitas ekonomi tidak semata-mata hanya untuk ekonomi itu sendiri. Secara inheren, ruang lingkup koperasi adalah sosial, ekonomi dan budaya. Namun, dalam konteks agenda perubahan, kini gerakan koperasi pun perlu bersifat politik. Politik bukan dalam politik praktis, tapi dalam artian memiliki tujuan untuk mengintervensi sistem ekonomi politik dominan, yakni kapitalisme. Inilah “yang politis”. Dengan demikian, imajinasi tentang corak produksi selain kapitalisme itu eksis perlu dibangun.

Kita bisa membayangkan ketika ekonomi dimiliki secara luas, sumber daya dan alat produksi dapat dikontrol oleh publik, maka ruang gerak elit dan oligark akan terbatas. Pada titik itulah, masyarakat bisa “merebut” politik dari kerangkeng dominasi elit dan oligarki. Sehingga demokrasi yang lebih emansipatif dan partisipatoris menjadi mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L., & Yusoff, M. A. (2010). Politik Lokal di Indonesia: Dari Otokratik ke Reformasi Politik. *Jurnal Ilmu Politik*, 21(1), 5–30.
- Ananta, D. D. (2016). Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014. *Jurnal Politik*, 2(1), 101–135.
- Arief, S. (2002). *Ekonomi Kerakyatan Indonesia: Mengenang Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Aulia, F. M., Maliki, & Asadullah, M. N. (2020). *Riset: Tanpa Intervensi, COVID-19 akan Membuat Setidaknya 3,6 Juta Orang Indonesia Jatuh Miskin*. The Conversation. <https://theconversation.com/riset-tanpa-intervensi-covid-19-akan-membuat-setidaknya-3-6-juta-orang-indonesia-jatuh-miskin-138551>
- Chalik, A. (2017). *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*. Pustaka Pelajar.
- Credit Suisse. (2019). *Global Wealth Report 2019*. <https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/research/publications/global-wealth-report-2019-en.pdf>.
- Djojohadikusumo, S. (1975). *Indonesia dalam Perkembangan Dunia: Kini dan Masa Depan*. LP3ES.
- Faedlulloh, D. (2016). Membangun Demokrasi Ekonomi: Studi Potensi Koperasi Multi-Stakeholders. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 42(1), 65–76.
- Gaventa, J. (2005). Reflections of the Uses of the 'Power Cube' Approach for Analyzing the Spaces, Places and Dynamics of Civil Society Participation and Engagement. *CFP Evaluation Series No 4*.
- Gaventa, J. (2006). Finding the Spaces for Change: A Power Analysis. *IDS Bulletin*, 33(6), 23–33.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2014). Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia. *Prisma - Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi*, 33(1), 35–56.
- Halim, A. (2014). *Politik Lokal Pola Aktor dan Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori Powercube Modal dan Pangung)*. LP2B.
- Hidayat, E., Prasetyo, B., & Yuwana, S. (2018). Runtuhnya Politik Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik*, 4(1), 53–86.

Idris, A. (2012). Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Demokrasi Ekonomi. *Makalah Disampaikan Dalam Diskusi Ilmiah MPR RI Dan Universitas Almuslim*.

Karimi, S. (2010). Manifesto Demokrasi Ekonomi: Sistem Pasar dan Keadilan Sosial. *Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas*.

Keling Kumang Group. (n.d.). *Profil Keling Kumang Group*. Web Keling Kumang Group. Retrieved August 7, 2020, from <https://kelingkumanggroup.co.id/profile>

Kusumaningtyas, A. N., Dewi, K. H., Ekawati, E., & Izzati, F. F. (2017). Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(2), 243–264.

Luviena, N., Stietely, A., & Hoyt, L. (2010). *Sustainable Economic Democracy: Worker cooperatives for the 21st Century*. MitColab Community Innovator Lab.

Mosca, G. (1939). *The Ruling Class*. McGraw Hill.

Mubyarto. (1994). *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. LP3ES.

Mubyarto. (1997). *Ekonomi Rakyat, Program IDT, dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Aditya Media.

Mutis, T. (1992). *Pengembangan Koperasi (Kumpulan Karangan)*. Gramedia.

Nandi, A. (2017). *Konglomerasi Ekonomi Sosial SANASA Group*. Kopkun Institute. <https://kopkuninstitute.org/2017/05/05/konglomerasi-ekonomi-sosial-sanasa-group/>

O'Donnell, G. A. (2004). Why the Rule of Law. *Journal of Democracy*, 15(4), 32–46.

Robison, R., & Hadiz, V. (2004). *Reorganizing Power In Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. Routledge.

Sastrawidjadja, M. S., & Adam, R. C. (2015). Langkah Menuju Konglomerasi Koperasi di Indonesia. *PJIH*, 2(2), 209–231.

Suroto. (2019). *Konglomerasi Korporasi Melawan Konglomerasi Koperasi*. <https://ekorantt.com/2019/09/16/konglomerasi-korporasi-melawan-konglomerasi-koperasi/>

Suwandi. (2010). Konglomerasi Koperasi. *Dipresentasikan Dalam Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Koperasi Di Kementerian Koperasi Dan UKM*.

Swasono, S.-E. (2008). *Kerakyatan Demokrasi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial: Implementasi Pasal 33 dan 34 UUD 1945*. Gerakan Jalan Lurus.

Varma, S. (2007). *Teori Politik Modern*. Raja Grafindo Persada.

Wie, T. (1981). *Pemerataan, Kemiskinan, Ketimpangan*. Sinar Harapan.

Winters, J. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.

World Bank. (2020). *Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class*.
<https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/aspiring-indonesia-expanding-the-middle-class>

Zuada, L. H. H., Suaib, E., & Syifatu, W. (2016). Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu dalam Pembangunan Perdesaan. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 167–191.

Pasca tumbangnya rezim Orde Baru yang sentralistik lahirlah kemudian undang-undang otonomi daerah, yakni daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri untuk kepentingan masyarakat luas. Tapi kita tahu, pada kenyataannya muncul pelbagai macam paradoks yang bertentangan dengan keinginan kebijakan otonomi daerah itu sendiri. Dalam kaitan ini, di banyak daerah bermunculan fenomena dinasti politik, oligarki lokal, politik transaksional, perilaku koruptif pejabat daerah, dan lain-lain. Para elit lokal itu biasanya memanfaatkan jabatan sosial, karisma, jaringan akar rumput, atau dukungan dari perusahaan tertentu dalam upaya merebut kekuasaan di daerah. Dengan kata lain, pesta demokrasi di daerah hanya sekadar seremonial peralihan kekuasaan dari satu aktor ke aktor berikutnya dengan masih berputar-putar di lingkaran dinasti dan oligarki lokal. Inilah paradoks implementasi otonomi daerah yang saat ini masih menjadi tantangan bagi masyarakat di daerah dan demokrasi lokal.



Diterbitkan oleh
**Percetakan & Penerbit
SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS**
Jln. Tgk. Chik Pante Kulu No. 1
Kopelma Darussalam
Telp. 0651-812221
**email: upt.percetakan@unsyiah.ac.id
unsyiahpress@unsyiah.ac.id**

<https://unsyiahpress.unsyiah.ac.id>

ISBN 978-623-264-293-5



9 786232 642935

ISBN 978-623-264-294-2 (PDF)